

**PROFESIONALISME KERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANAH LAUT**

Febriyanti Rahmah¹, Murdiansyah Herman², Fika Fibriyanita³

¹Ilmu Administrasi Publik,63201, Fisip, Uniska, 16120140

²Ilmu Administrasi Publik,63201, Fisip, Uniska, 1109127301

¹Ilmu Administrasi Publik,63201, Fisip, Uniska, 112102880

E-mail: febriyantirahmah282@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran profesionalisme kinerja Aparatur Sipil Negara dan untuk mengetahui apasaja kendala-kendala dalam profesionalisme kerja Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan dengan menggunakan data primer kepada 5 orang informan. Sampel ditentukan dengan menggunakan teknik Purposive sample. Analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, data display dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran profesionalisme kerja dengan menggunakan aspek kreatifitas, inovasi dan responsifitas masih dikatakan belum optimal dikarenakan banyaknya aparatur sipil negara yang kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas, selain itu sarana dan prasarana sudah tidak memadai. Oleh karena itu saran dari peneliti harus adanya perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten terkait hal ini mengingat kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini merupakan tempat satu-satunya dalam pengurusan data administrasi kependudukan.

Kata Kunci : Profesionalisme, Aparatur Sipil Negara

ABSTRACT

FEBRIYANTI RAHMAH, NPM. 16120140 "Professionalism of the Performance of the State Civil Apparatus in the Office of Population and Civil Registration of Tanah Laut Regency". Guidance by Mr. Murdiansyah Herman as Principal Advisor and Mrs. Fika Fibriyanita as Co Advisor.

The purpose of this study was to determine the professionalism of the performance of the State Civil Apparatus in the Civil Service and Population Office of Tanah Laut Regency and to find out what are the obstacles in the professionalism of the performance of the State Civil Apparatus in the Population and Civil Registry Office of Tanah Laut Regency.

The research method uses a qualitative approach to the type of descriptive research. Data were collected using primary data to 5 informants. The sample is determined using the Purposive sample technique. Data analysis uses data collection, data reduction, data display and conclusion drawing or verification.

The results showed that the picture of professionalism by using aspects of creativity, innovation and responsiveness is still said to be not optimal due to the large number of state civil servants who lack a sense of responsibility for the task, besides that the facilities and infrastructure are inadequate. Therefore, suggestions from researchers must be given special attention from the District Government in this regard considering the position of the Population and Civil Registry Office is the only place in the administration of population administration data.

Keywords: Professionalism, State Civil Apparatus

LATAR BELAKANG MASALAH

Tujuan Nasional telah jelas di sebutkan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia di alenia ke 4 (empat) yang berbunyi yaitu “Untuk memajukan dalam kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi, keadilan sosial“. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, maka perlu adanya peran Aparatur Sipil Negara yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta mampu menjalankan perannya sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas peran Aparatur Sipil Negara. Dimana pembangunan akan dapat terlaksana sesuai tujuan apabila Sumber Daya Manusia (SDM) yang digunakan memadai, baik itu pelaksanaan pembangunan tingkat Nasional maupun Regional. Artinya tenaga kerja yang dapat melaksanakan pembangunan harus memiliki keahlian secara khusus guna memberikan kesinambungan dalam melaksanakan tujuan pembangunan.

Pengembangan ini Sumber Daya Manusia yang merupakan suatu keharusan mutlak baik yang menghadapi tuntutan tugas ataupun sekarang dan diwaktu yang akan datang. Dengan adanya pengaturan manajemen Sumber Daya Manusia secara profesional, maka diharapkan para Aparatur Sipil Negara dapat memberikan kontribusi yang maksimal sebagaimana yang telah diharapkan, terutama dalam hal pelayanan public pada saat ini.

Dalam mencapai pelayanan ini publik yang baik, akan profesional kerja Aparatur Sipil Negara faktor yang paling urgen. Dimana profesional kerja merupakan cikal dan bakal dari semua yang tercapainya suatu pelayanan publik. Karena itu, profesional kerja Aparatur Sipil Negara sangat harus menjadi fokus perhatian kepada pihak terkait. Karena semakin tinggi kualitas ini Sumber Daya Manusi akan semakin baik pula kinerja yang hasilnya terutama dalam hal pelayanan publik sekarang.

Oleh karena itu, manajemen kepegawaian dalam organisasi atau instansi

sangatlah penting sebagai tolak ukur efektif atau tidaknya organisasi tersebut. Artinya dalam rangka memajukan organisasi yang bersangkutan, sehingga kinerja yang dihasilkan maksimal maka profesionalisme kerja apatur haruslah kompeten dalam bidangnya masing-masing. Seperti, kompetensi dalam bidang keuangan dan administratif.

Namun, berdasarkan observasi peneliti bahwa tingkat profesional kerja pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut masih kurang atau dengan kata lain masih jauh dibawah harapan mengenai pelayanan publik yang efektif dan efisien serta banyak Aparatur Sipil Negara yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata. Hal ini dilihat dari berbagai macam keluhan yang di sampaikan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan. Seperti adanya pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu, pelayanan yang sengaja di abaikan dan pelayanan hanya terfokuskan kepada 1 (satu) orang saja, serta adanya pelayanan kepada masyarakat yang terkesan pilih kasih. Sehingga proses pelayanan tidak efektif dan kurang profesional.

Aparatur yang memiliki sikap profesional pada dasarnya akan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pelayanan yang baik memiliki hubungan yang erat kepada kepuasan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan yang prima merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh setiap aparatur birokrasi khususnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang merupakan salah satu penyelenggara pelayanan publik. Agar penyelenggara pelayanan publik berjalan dengan baik, maka aparatur birokrasi pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil harus bekerja secara profesional. Maka dari itu penulis mengambil judul “Profesional Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut “.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Definisi Profesionalisme

Dalam pencapaian pelayanan publik yang produktif, yang mana profesionalisme pegawai menjadi cikal dan bakal. Oleh karena itu peningkatan profesionalisme pegawai harus menjadi salah satu fokus perhatian oleh pihak

terkait. Adapun kaitanya dengan organisasi yaitu semakin tinggi dan bagus sumber daya aparatur yang ada maka semakin baik pula kinerja yang dihasilkan terutama dalam hal pelayanan publik. Seperti yang dinyatakan oleh Budi Rajab (dalam Fitri Wirjayanti,2014) bahwa profesionalisme sangat lah dibutuhkan dalam organisasi. Diperlukan Sumber Daya Manusia yang profesional, akan menciptakan kemampuan yang baik dan komitmen dari orang-orang bekerja dalam organisasi tersebut sekaligus dapat membantu organisasi.

Bagi seorang pekerja, profesional merupakan salah satu aspek yang penting dalam melaksanakan pekerjaan karena dengan adanya sikap profesional yang tumbuh pada diri seorang pekerja maka segala sesuatu yang dikerjakan menjadi lebih produktif. Dimana para pekerja mampu memahami dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prinsipnya (ahlinya) berdasarkan kesadaran dan pengetahuan yang memadai. Seperti yang dinyatakan oleh David H. Maister (dalam Fitri Wirjayanti,2014) bahwa “Orang-orang Profesional adalah orang-orang yang di andalkan dan dipercaya karena mereka ahli, terampil, punya ilmu pengetahuan, bertanggung jawab, tekun, penuh disiplin dan serius dalam menjalankan tugas pekerjaannya”. Semua itu membuat istilah profesionalisme identik dengan kemampuan, ilmu atau pendidikan dan kemandirian.

2. Definisi Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara merupakan pegawai yang di tunjuk untuk mengelola tugas-tugasnya sesuai dengan bidangnya dan bertanggung jawab atas tugas itu sendiri. Dimana hasil dari usaha mereka tersebut akan diberi penghargaan oleh pejabat pembina kepegawaian berupa gaji, yang mana gaji tersebut sudah dirumuskan di dalam perundang-undangan.

Berikut Pokok-Pokok dari Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara :

a. Jenis, Status, dan Kedudukan Pegawai ASN terdiri atas:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

b. Jabatan Aparatur Sipil Negara

Jabatan Aparatur Sipil Negara terdiri atas:

1. Jabatan Administrasi;
2. Jabatan Fungsional; dan
3. Jabatan Pimpinan Tinggi.

Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. Jabatan administrator;
2. Jabatan pengawas; dan
3. Jabatan pelaksana.

Aparatur Sipil Negara berhak memperoleh:

1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas;
2. Cuti;
3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
4. Perlindungan; dan
5. Pengembangan kompetensi

Sedangkan untuk kewajiban Aparatur Sipil Negara terdiri dari:

1. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD Tahun 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah;
2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
6. Menunjukkan integritas atau keteladanan dalam sikap dan perilaku serta ucapan, tindakan kepada setiap orang lain, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
7. Menyimpan rahasia jabatan hanya bisa mengemukakan untuk rahasia jabatan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan

8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan kata lain Aparatur Sipil Negara merupakan pegawai yang di tunjuk untuk mengelola tugas-tugasnya sesuai dengan bidangnya dan bertanggung jawab atas tugas itu sendiri.

3. Indikator Variabel Penelitian

Profesional secara umum menyangkut pada karakteristik dan kemampuan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan agar pekerjaan tersebut di jalan akan lebih efektif dan efisien karena adanya tanggung jawab kerja serta adanya ke ahlian di bidang yang khusus. Sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara produktif.

Konsep profesional dalam diri Aparatur Sipil Negara dilihat dari segi :

1. Kreatifitas (creativity)
2. Inovasi (inovasi)
3. Responsifitas (responsivity)

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penggunaan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini bermaksudkan untuk menjelaskan dan menggambarkan atau mendeskripsikan kejadian Analisis Profesionalisme Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.

Alasan peneliti memilih penelitian tentang Profesionalisme Kerja Pegawai ini adalah karena peneliti tertarik untuk mengetahui kendala - kendala dalam meningkatkan profesionalisme kerja pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Serta hal ini juga merupakan salah satu kewajiban peneliti untuk memenuhi tugas akhir Skripsi.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif karena didalam pelaksanaannya akan meliputi data, analisis interpretasi tentang arti atau data yang diperoleh. Penelitian disusun untuk penelitian

induktif yaitu mencari dan mengumpulkan data yang di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui faktor, unsur bentuk, dan suatu sifat dari fenomena di masyarakat.

Pendekatan deskriptif ini digunakan dalam menjelaskan dan menggambarkan fakta yang terjadidivariabel yang diteliti yakni *locus of control*, komitmen profesional kerja auditor internal dan untuk mengetahui gambaran dari masing-masing variabel.

3. Lokasi Penelitian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Jl. Datu Daim II, Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70812, Indonesia. Sedangkan alasan peneliti mengambil lokasi tersebut adalah :

1. Karena berdasarkan keperluan masyarakat yang setiap hari bertambah dalam mengurus pengadministrasian dengan tingkat kebutuhan yang besar dan beragam serta berbeda beda. Disamping itu juga jumlah Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut hanya didukung dengan 26 orang saja. Sehingga dari fenomena tersebut membuat penulis tertarik untuk mengetahui tingkat profesionalisme kerja Aparatur Sipil Negara dalam menyelenggarakan pelayanan publik khususnya di Kabupaten Tanah Laut.

2. Karena banyaknya kritikan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).

Sumber Data

Sumber data berasal dari informan-informan terpilih, yang mana dilakukan secara purposive dan snowball sampling yaitu teknik menentukan informan berdasarkan tujuan dan keperluan yang ditetapkan peneliti sendiri.

Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sekretariat Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, Kelapa Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Staf Bidang Kepegawaian Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, serta masyarakat di lingkungan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data (subyek maupun sampel penelitian).

Teknik- pengumpulan data ini yang akan digunakan kedalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode wawancara dan observasi, serta dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan kepada dua belah pihak yakni (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai, Peneliti dalam hal ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur yakni wawancara yang bisa pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Pewawancara memberikan pertanyaan pada informan namun bisa berkembang dan lebih bebas untuk sesuai dengan situasi dan informasi yang diperlukan oleh informan.

2. Observasi

Observasi adalah suatu metode atau cara untuk menganalisis dan melakukan pencatatan yang dilakukan secara sistematis, tidak hanya terbatas dari orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain, penggunaan metode observasi dalam penelitian kualitatif adalah memungkinkan melihat dan mengamati sendiri fenomena yang terjadi pada saat penelitian, kemudian yang mencatat perilaku serta kejadian sebagaimana terjadi pada keadaan sebenarnya tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan hal peristiwa yang sudah berlalu, dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya yang monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk

tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan.

6. Analisis Data

Mengatakan bahwa analisis data yaitu proses mencari atau menyusun secara sistematis data yang didapat dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi, dengan caranya mengorganisasikan ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit dan melakukan sintesa, menyusunnya dalam pola, memilih mana yang sangat penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.

Proses analisis data menurut model Miles dan Huberman yaitu meliputi aktivitas pengumpulan data, reduksi data, data display dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut :

1)Pengumpulan Data

2)Reduksi Data

3)Display Data

4)Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan langkah-langkah analisis data diantaranya Pengumpulan data, Reduksi Data , Display Data dan Penarikan Kesimpulan.

PEMBAHASAN

Dengan berdasarkan pemikiran terhadap permasalahan yang di hadapi oleh aparatur birokrasi Indonesia maka sebagai upaya untuk memperbaiki berbagai kelemahan dan mengantisipasi perubahan lingkungan maka di perlukan sebuah pemikiran untuk membangun apatur birokrasi Indonesia yang handal, profesional dan menjunjung tinggi nilai kejujuran serta etika profesi dan menjalankan tugas serta fungsinya sebagai penyelenggara kegiatan pembangunan dan penyelenggara pelayanan publik.

Mengingat urgensitas peran aparatur sipil negara dalam penyelenggara pelayanan publik perlu kiranya dicari, dirumuskan serta di tanggulangi dengan suatu pendekatan yang strategis untuk membangun aparatur professional yang handal, tanggap dalam memberikan pelayanan.

Istilah profesional juga bisa diartikan dengan suatu kemampuan atau keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan dan menurut bidang tingkatan masing-masing tersebut. Profesionalisme menyangkut (fitness) antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi dengan kebutuhan tugas. Terpenuhinya kecocokan antara kemampuan dengan kebutuhan tugas merupakan syarat terbentuknya aparatur yang profesional.

Untuk melayani kepentingan masyarakat dibutuhkan konsentrasi yang sangat maksimal petugas. Maka sangat diharapkan pelaksanaan yang pekerjaan bisa sepenuh hati dan penuh rasa tanggung jawab agar masyarakat yang dilayani akan merasa terpuaskan kebutuhannya. Apabila kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan sangat tinggi, maka hal tersebut dapat menjadi indikator kualitas organisasi pemerintahan yang objektif dan efisien.

Pada penelitian ini untuk mengukur profesionalisme aparatur sipil negara pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dengan mengungkap aspek sebagai berikut : Berdasarkan surat keputusan MENPAN No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, maka prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik adalah :

1. Prosedur pelayanan, kemudahan pelayanan yang diberikan pada masyarakat untuk dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
2. Persyaratan pelayanan, persyaratan teknis yang administratif dapat diperlukan untuk pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan.
3. Kejelasan petugas pelayanan, keberadaan atau kepastian petugas untuk memberikan pelayanan (nama, jabatan, serta kewenangan dan tanggung jawabnya).
4. Kedisiplinan petugas pelayanan, petugas dalam memberikan pelayanan konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan jam yang berlaku.
5. Tanggung jawab petugas pelayanan, wewenang dan tanggung jawab petugas sebagai penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan ini.

6. Kemampuan petugas pelayanan, keahlian atau keterampilan yang petugas miliki didalam memberikan dan menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.

7. Kecepatan pelayanan yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan, dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.

8. Keadilan menetapkan pelayanan pelaksanaan pelayanan yang bisa dengan tidak membedakan golongan maupun status masyarakat yang akan dilayani.

9. Kesopanan dan keramahan petugas, perilaku petugas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah dan serta saling menghargai dan menghormati tersebut.

10. Kepastian jadwal pelayanan, pelaksanaan waktu pelayanan yang sesuai dengan ketentuan tersebut telah ditetapkan.

11. Kenyamanan lingkungan, kondisi sarana atau prasarana pelayanan yang bersih dan rapih, teratur sehingga bisa memberikan rasa nyaman kepada Penerima Pelayanan tersebut.

12. Keamanan pelayanan terjaminnya keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan dan sarana yang digunakan sehingga dapat masyarakat merasa tenang agar tidak mendapatkan pelayanan terhadap resiko - resiko yang diakibatkan saat terlaksana.

Dari segala masalah yang mungkin timbul. Akibatnya daya kreativitas dan inisiatif aparatur tidak berkembang, serta masalah yang sering timbul adalah tertundanya penyelesaian suatu pelayanan, karena aparatur jika menemui kesulitan lebih memilih menunggu atasan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan.

Dari segi layanan, aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tergolong masih belum optimal. Yang peneliti amati karena tidak adanya pusat informasi khusus, sehingga masyarakat yang ingin bertanya harus bertanya kepada petugas layanan, yang mana pada dasarnya loket pelayanan bukan lah sebagai pusat informasi, melainkan sebagai tempat proses administrasi. Selain itu keahlian aparatur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut sendiri

masih kurang, hal ini dilihat dari cara aparatur yang masih kebingungan dalam melayani masyarakat. Sehingga dalam hal ini kurangnya tanggung jawab aparatur terhadap masyarakat.

Dari segi kedisiplinan, terutama disiplin waktu. Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut juga masih tergolong kurang, karena adanya aparatur yang masih mementingkan urusan rumah tangga, sehingga setiap pagi para aparatur terlambat untuk masuk kerja. Hal ini peneliti amati langsung berdasarkan hasil observasi peneliti, bahwa melihat aparatur yang terlambat.

Dari yang peneliti amati hal seperti ini perlu adanya audit secara berkala, sikap aparatur sendiri lah yang membuat proses administrasi menjadi lalai, lepas dari tanggung jawab kerja, sehingga masyarakat biasa tidak bisa berkutik apa-apa. Hanya bisa melihat apa yang dilakukan oleh para pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini:

1. Profesionalisme dari Aspek Kreatifitas, para aparatur dituntut mengerjakan tugas sesuai Standar Operasional Pegawai (SOP) yang telah di tetapkan saja. Tidak ada yang bisa berkreatifitas sendiri, hal ini dilihat dari aparatur yang tidak menunjukkan perbedaan kerja dengan aparatur lainnya. Dan yang mendorong para aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tidak bisa berkreatifitas juga karena aspek ini tidak memberikan keuntungan apa-apa baik dari dari jenjang karir nya mauoun untuk penambahan insentif, sehingga membuat aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut enggan untuk berkreatifitas. Hal ini perlu adanya sorotan lebih oleh pemerintah setempat yang mana, apabila para aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut ini di berikan kebebasan kreatifitas sebagaimana harusnya, maka pelayanan juga akan lebih baik.

2. Profesionalisme dari Aspek Inovasi, Profesionalisme aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dapat dikatakan belum dilakukan secara optimal karena belum nampak adanya inovasi-inovasi baru dari para aparatur sendiri. Masih adanya hambatan yang bersifat individual dan lembaga dalam mengembangkan pola kerja yang inovatif. Sikap inovatif perlu ditumbuhkan dan di kembang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, karena dengan adanya inovasi-inovasi baru terkait proses pelayanan maka masyarakat akan merasa terbantu dan akan merasa terpuaskan akan keperluan nya.

3. Profesionalisme dari Aspek Responsifitas. Upaya yang telah di lakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dalam merespon aspirasi publik dengan memberikan kotak saran disetiap sudut ruang tunggu, penyampaian kritikan dan saran melalui website dan via SMS. Akan tetapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut belum bisa secara tanggap merespon aspirasi tersebut, karena harus adanya keputusan dari Kepala Dinas terkait tindak lanjut selanjutnya, apakah kritikan itu membangun atau tidak, terlebih juga harus mempertimbangkan kondisi dan keadaan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut juga belum konsisten terhadap apa yang telah menjadi komitmen mereka untuk memberikan pelayanan yang tepat waktu serta tanggung jawab terhadap masyarakat.

SARAN

Adapun saran-saran dari hasil penelitian guna untuk meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur sipil negara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, antara lain sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian pegawai. Seperti melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan secara rutin dan berjangka, baik yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut maupun lembaga diluar daerah.

2. Perlu adanya perbaikan sistem secara menyeluruh dan membuat pusat informasi.
3. Perlu adanya perbaikan sarana dan prasarana guna menunjang operasional pelayanan, baik secara kualitas maupun kuantitas.
4. Perlu adanya peningkatan kedisiplinan pegawai dengan cara menegakkan aturan secara adil dan tidak diskriminatif.
5. Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia (SDM).

DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan dan Taylor. 2014. Prosedur Penelitian. Dalam Moleong, Pendekatan Kualitatif. (hlm. 4). Jakarta: Rineka Cipta
- Budi Rajab. 2014. Profesionalisme dalam peralihan peradaban. Gramedia pustaka utama. Jakarta
- Indriantoro, Nur., dan Supomo, Bambang. (2014). Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen. Yogyakarta: BPFE.
- Maister, David H, True Professionalism, Profesionalisme Sejati, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Maister, David H, True Professionalism, Profesionalisme Sejati, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1998
- Moleong, Lexy J, 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Payaman J. Simanjuntak .2015.Manajemen Evaluasi Kinerja .Edisi 3. Jakarta. Fakultas UI
- Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1976 dan surat edaran kepala Badan kepegawaian nomor 03/SE/1976
- Prawirosentono, Suyadi. 2015. Manajemen Sumber Daya Manusia: Kebijakan Kinerja Karyawan. Edisi 1. Cetakan Kedelapan. BPFE. Yogyakarta
- Republik Indonesia. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Ricardianto, Prasadja (2018). Human Capital Management. Jakarta : Media.
- Sekaran, Uma dan Bougie, R. 2017. Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan

- Pengembangan-Keahlian. Jakarta. Salemba Empat.
- Siagian, P. Sondang. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia. STIE YKPN: Yogyakarta.
- Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta
- Suriasumantri, Jujun S. 2017. Filsafat Ilmu. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Syafrudin dkk. 2016. Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan Untuk Bidan Jakarta: Trans Info Media
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara